

PROSPEK AHLI EKONOMI SYARIAH DI DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Oleh:
Abdul Wadud Nafis
Dosen Tetap IAIN Jember

Abstrak

Kemunculan ilmu Islam ekonomi modern di panggung internasional, dimulai pada tahun 1970-an yang ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer, seperti Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Shiddiqy, Kursyid Ahmad, An-Naqvi, M. Umer Chapra, dll. Sejalan dengan itu berdiri Islamic Development Bank pada tahun 1975 dan selanjutnya diikuti pendirian lembaga-lembaga perbankan dan keuangan Islam lainnya di berbagai negara. Pada tahun 1976 para pakar ekonomi Islam dunia berkumpul untuk pertama kalinya dalam sejarah pada International Conference on Islamic Economics and Finance, di Jeddah.

Di Indonesia, momentum kemunculan ekonomi Islam dimulai tahun 1990an, yang ditandai berdirinya Bank Muamalat Indoenesia tahun 1992, kendatipun benih-benih pemikiran ekonomi dan keuangan Islam telah muncul jauh sebelum masa tersebut. Sepanjang tahun 1990an perkembangan ekonomi syariah di Indonesia relatif lambat. Tetapi pada tahun 2000an terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan asset, omzet dan jaringan kantor lembaga perbankan dan keuangan syariah. Pada saat yang bersamaan juga mulai muncul lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam, walaupun pada jumlah yang sangat terbatas, antara lain STIE Syariah di Yogyakarta (1997), D3 Manajemen Bank Syariah di IAIN-SU di Medan (1997), STEI SEBI (1999) , STIE Tazkia (2000), dan PSTTI UI yang membuka konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam, pada tahun 2001.

Para pemimpin ASEAN sepakat melakukan kerja sama dibidang ekonomi, yang disebut ASEAN Economic Community. Yang dimaksud ASEAN Economic Community adalah Kesepakatan bersama untuk mengintegrasikan berbagai negara Asean (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar) yang masing-masing memiliki latar-belakang sosial-budaya, ideologi politik, ekonomi dan kepentingan berbeda ke dalam suatu komunitas yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebagai pasar tunggal kawasan terpadu Asean dengan luas sekitar 4,47 juta km persegi yang didiami oleh lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara anggota ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memacu daya

*saing ekonomi kawasan ASEAN yang diindikasikan melalui terjadinya arus bebas (free flow) : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.*¹ ASEAN Economic Community merupakan tantangan bagi ekonomi Islam dan diwaktu yang sama juga memberi peluang besar bagi masa depan ekonomi Islam, karena Lembaga keuangan Syariah dan bisnis Syariah akan berkembang di seluruh negara-negara ASEAN.

Kata Kunci: Ekonomi Syari'ah, ASEAN

Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Kondisi perekonomian domestik maupun internasional mutakhir, terutama setelah timbulnya krisis keuangan global September 2008 di USA lalu dan krisis moneter pada pertengahan 1997 di Indonesia dan negara-negara lain di ASEAN dengan segala dampaknya seperti likuidasi atas 69 bank swasta nasional serta menggunakan biaya rekapitalisasi perbankan yang mencapai Rp 635 triliun, menuntut kita untuk mencermatinya secara serius dan dengan sudut pandang yang harus berbeda. Apapun, kondisi tersebut membuktikan bahwa sistem perekonomian kapitalis makin mengalami kesulitan untuk menghantarkan masyarakat menuju keadaan yang dicitacitakannya. Pada akhirnya, sorotan terhadap "kehampaan" tatanan ekonomi dunia memaksa berbagai kalangan menengok kepada sistem ekonomi alternatif, yakni sistem ekonomi Islam yang kendati secara faktual belum terujud, secara intelektual sedang dalam pengkajian intensif, tapi secara imani diyakini mampu memberikan solusi. Bahkan praktik dalam berbagai bidang ekonomi Islam juga sudah dimulai di Indonesia sejak beberapa tahun lalu.²

Tepat dua tahun setelah munculnya krisis keuangan Asia, dibuka Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sebagai bank Syari'ah milik pemerintah pertama di tanah air. Langkah BSM ini disusul oleh Bank IFI yang membuka cabang Syari'ah, demikian juga cabang syari'ah Bank Bukopin di Aceh. Di antara bank milik pemerintah daerah, Bank Jabar adalah bank PEMDA yang pertama memiliki

¹ Gusmardi Bustami, 2012, *Menuju Asean Economic Community 2015*, Jakarta, Depdag, 23

² Zuardin Azzaino, 1987. *Ekonomi Ilahiah: Suatu Pembeda*. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 312

cabang syari'ah. Setelah melihat respons yang cukup positif, dua bank pemerintah lainnya, BNI-46 dan BRI, dan bank swasta (Bank Danamon), juga masuk ke industri perbankan yang baru ini. Hingga pada Februari 2008, telah terdapat 3 Bank Umum Syariah, 13 unit Usaha Syariah Bank Umum, 14 unit usaha Syariah BPD, 3 Bank Kustodian Syariah, 114 lebih Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Untuk 2008, BI meyakini industri bank syariah masih menikmati periode *high growth*. Oleh karena itu, BI mematok pangsa aset lima persen sebagai *direction* dan *anchor* bagi industri perbankan syariah. Dalam program akselerasinya tahun ini, BI menerbitkan sejumlah kebijakan lanjutan. Dengan berbagai kebijakan tersebut, BI memproyeksikan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan selama 2008 mampu mencapai masing-masing sebesar Rp 91,6 triliun, Rp 73,3 triliun, dan Rp 68,9 triliun.³

Di samping itu, perkembangan lembaga keuangan mikro Syariah yang di Indonesia disebut sebagai Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) sangat pesat. Dalam prakteknya BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu Baitul Tamwil dan Baitul Mal. Baitul Mal Wat-Tamwil bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sedangkan baitul Mal menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Pada akhir 2013, menurut berita di harian nasional Republika menyebutkan bahwa BMT itu beragam dari sisi aset, yakni ada yang besar dan kecil. Di antaranya ada yang mencapai aset sampai Rp 7 miliar. Tetapi ada pula yang asetnya yang sebesar Rp 100 juta. Pada akhir 2013, dari 3.800 BMT yang ada, diperkirakan total asetnya senilai Rp 4 triliun dengan perputaran dana mencapai Rp 3,8 triliun. Akhir 2007, jumlah BMT mencapai 5000-an BMT.

Praktek ekonomi Islam dalam aspek asuransi Syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1994 yang ditandai dengan pendirian PT Asuransi Takaful Indonesia. Setelah itu, jasa asuransi

³ Bank Indonesia (2013), *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 34-57

yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah mulai dikembangkan baik oleh lembaga asuransi *full Syariah* ataupun perusahaan asuransi yang mengembangkan divisi syariah. Keberadaan asuransi syariah didorong oleh anjuran adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi dan keyakinan sebagian masyarakat bahwa pengelolaan asuransi harus sejalan dengan kaidah dan prinsipsyariah khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bebas riba, maysir dan gharar.⁴

Sepanjang 2013, asuransi Syariah masih menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Sebanyak sepuluh perusahaan asuransi konvensional membuka cabang syariah, terdiri atas delapan perusahaan asuransi kerugian dan satu perusahaan reasuransi. Dengan demikian, sampai akhir 2013 terdapat 37 perusahaan asuransi Syariah, 3 reasuransi syariah, 5 broker asuransi dan reasuransi Syariah.

Perkembangan yang menggembirakan juga terjadi di pasar modal, yaitu dengan hadirnya reksadana Syari'ah PT Danareksa dan *Investment management syari'ah* PT PNM (persero). Hingga akhir 2013, terdapat 18 reksadana Syariah dan 29 Obligasi Syariah & Medium Term Notes (MTN).

Di samping itu, potensi untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah yang ada di masyarakat Indonesia amat sangat besar. Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di DIY, 7-9 April 2013 mencapai 59 triliun Rupiah per tahun. Angka ini hampir sama dengan hasil kajian Rumah Zakat pada tahun 20012. Padahal dari potensi yang sebegini besar itu, baru 1,8 Miliar yang dapat dihimpun. Oleh karena itu, untuk menghimpun potensi dana zakat, infak, dan sedekah yang ada di masyarakat Indonesia diperlukan tenaga sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Dalam konteks ini Lembaga amil ZIS harusnya memiliki SDM seperti lembaga keuangan profesional semisal bank dan juga manajer investasi, demikian juga diperlukan nadzir profesional

Berdasarkan gambaran di atas, perkembangan praktek ekonomi Islam di Indonesia memberikan harapan besar yang

⁴ Ismail. Nawawi, 2013, *Perbankan Syariah (Issu-Issu Manajemen Fiqih Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik)*, sidoarjo: vivpress, 40

menumbuhkan optimisme bagi umat Islam untuk terus berupaya mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia, terlebih lagi setelah lahirnya UU Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara. Aspek-aspek ekonomi Islam yang dipraktekkan juga telah meluas. Berdasarkan data tersebut di atas, telah terdapat ratusan lembaga keuangan dan bisnis syariah dengan ribuan kantor pelayanan syariah di Indonesia. Namun menjadi pengetahuan bersama, bahwa kecepatan pertumbuhan bisnis syariah tidak diikuti dengan penyediaan SDM yang mencukupi.

Kebutuhan SDM Ekonomi Islam

Salah satu persoalan yang kini dihadapi industri keuangan syariah di Indonesia adalah ketersedian SDM berkualitas. Terus berkembangnya industri keuangan dan perbankan syariah mendorong meningkatnya kebutuhan SDM berkualitas. BI (Bank Indonesia, red) pernah menyatakan untuk mengejar pangsa pasar perbankan syariah menjadi lima persen, kita kekurangan tenaga kerja sekitar 40 ribu.⁵

Persoalan kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan bisnis syariah. Hal tersebut terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengakses layanan perbankan syariah dibandingkan layanan perbankan konvensional.

Salah satu perusahaan konsultan manajemen terbesar dunia, AT Kearney melaporkan terbatasnya SDM berkualitas di sektor perbankan Syariah akan menjadi kendala terbesar dalam mengembangkan industri tersebut. Terlebih, dengan terus berkembangnya industri perbankan Syariah, maka tuntutan akan SDM baru berkualitas akan semakin besar. AT Kearney memprediksi industri perbankan syariah ASEAN dalam satu dekade mendatang membutuhkan sedikitnya sekitar 100 ribu SDM baru berkualitas. "Bank-bank syariah di wilayah ASEAN membutuhkan 100 ribu praktisi perbankan syariah baru dalam satu dekade mendatang".

Menurut Direktur Dow Jones Islamic Market Index (DJIM), Rushi Siddiqui, terbatasnya sumber daya juga terjadi di sisi SDM

⁵ Muhammad, . *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia. 2013

pengawas Syariah. Terlebih, kebutuhan akan SDM tersebut diprediksi akan terus meningkat sejalan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan konvensional Barat yang mulai memasuki bisnis syariah.

Siddiqui menyebutkan, data terbaru *Islamic Finance Information Service* (IFIS) di London menunjukkan jumlah pakar syariah internasional saat ini sangat terbatas. Pada tahun 2013, hanya terdapat 187 pakar syariah internasional yang melakukan supervisi kesesuaian Syariah bagi total 300 lembaga keuangan syariah di dunia. Sheikh Nizam Yaquby asal Bahrain misalnya mensupervisi hampir 40 lembaga keuangan syariah. Siddiqui menyebutkan, berdasarkan data tersebut, lembaga keuangan syariah dunia terbukti masih membutuhkan penambahan jumlah pakar syariah lebih banyak.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan dan perbankan syariah di Malaysia tumbuh cukup pesat. Untuk mendukung perkembangan bisnis itu, maka ketersediaan SDM profesional sangat dibutuhkan. Bahkan, hingga 2013, sebanyak 11.600 SDM profesional dibutuhkan untuk mendukung bisnis tanpa bunga itu. Dengan demikian, perkembangan sektor keuangan dan perbankan Syariah negara itu bisa berjalan secara optimal. Situs www.researchandmarkets.com, lalu melansir hasil penelitian mengenai perkembangan keuangan syariah global. Berdasarkan penelitian itu, perbankan syariah merupakan industri keuangan di dunia dengan tingkat pertumbuhan paling cepat.

Perkembangan kebutuhan SDM dalam industri dan bisnis Syariah Di Indonesia

No	Jenis Lembaga	Prediksi 10 tahun yang akan datang 5 kali lipat		Tenaga yang dibutuhkan dg asumsi 1:20
		Th 2007	Th 20114	
1.	Perbankan Islam	228 kantor cabang* 120 KCP	1740 kantor	34.800 orang Jika berdasar target blue print bank Syariah yang dikeluarkan BI, jika pada th 2009 depan market share bank Syariah mencapai 5 %, maka SDM yang dibutuhkan sudah 40.000 orang. Dg demikian th 2017 bisa mencapai 80.000 orang

2.	BPR Syariah	234	1170 kantor	11.700 orang
3.	Asuransi Syari'ah	138 kantor*	690 kantor	2.3400 orang
4.	Lembaga zakat	105 kantor	525 kantor	10.500 orang
5.	BMT	3.800 BMT	19.000	380.000 orang
6.	Reksadana Syariah dan MTN	47	235	4.700 orang
7.	Bisnis Syariah	27	135	2.700 orang
Total		4.125 kantor	467.400 orang atau 547.800 orang	

*Sumber: data Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2011, 2012, 2013 dan statistic Perbankan Syariah dengan modifikasi

Dengan demikian, peluang untuk memenuhi kebutuhan SDM yang mencapai ratusan ribu orang tersebut terbuka lebar. Untuk memenuhi kebutuhan SDM professional dalam berbagai bidang tersebut diperlukan lembaga pendidikan yang betul-betul unggul dan siap mensuplai kebutuhan SDM tersebut.

Mencermati masalah ketersediaan SDM profesional ini, *alhamdulillah* beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan sudah mulai terpanggil. Diantara lembaga pelatihan itu adalah; *Tazkia Institute, Shariah Economic and Banking Institute* (SEBI), Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Mandiri (PPSDM), Muamalat Institute, Karim Bussiness Consulting, dan Divisi Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia (IBI).

Pada tataran pendidikan formal terdapat Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, STAIN JMBER, UIN SA Surabaya, SBI institute, SEBI, STIS Yogyakarta, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta, UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, UIN Yogyakarta, IAIN Medan, dan Fakultas Ekonomi UNAIR, STEI Tazkia, dan Jurusan Timur Tengah dan Islam UI serta upaya lain dari beberapa universitas Islam yang cukup banyak.⁶

Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran strategis sebagai salah satu faktor terwujudnya kehandalan

⁶ Laporan Ditpertas 2013

Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan sebagai salah satu modal dasar kesinambungan pembangunan nasional. http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wp-admin/_ftn14 Oleh karena itu, pembangunan bidang pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun swasta. Lebih dari itu, perkembangan zaman di masa mendatang yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang sangat cepat serta tingginya tingkat turbulensi perubahan lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, membutuhkan kesiapan SDM yang ‘paripurna’ dari sisi jenjang akademik. SDM yang sedemikian itu ditandai oleh kemampuan analisis dan prediksi yang handal, dilatarbelakangi dengan bekal teoritis yang komprehensif dan disertai dengan integritas yang tinggi untuk mengembangkan disiplin ilmu yang ditekuninya. Berbekal pada tekad ini diharapkan peranan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan nasional akan lebih meningkat.

Penutup

Berasarkan paparan tersebut di atas, nyatalah bahwa perkembangan praktik ekonomi Islam dalam berbagai aspeknya yang begitu pesat membutuhkan supply SDM yang unggul dalam menjaga dan meneruskan eksistensi ekonomi Islam di dunia. Dukungan pemerintah yang semakin baik dan akomodatif terhadap perkembangan praktik ekonomi Islam, terutama lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Syariah Negara pada tahun 2008 lalu memberikan harapan baru yang lebih cerah tentang masa depan praktik ekonomi Islam di Indonesia. Oleh karena itu, ketersediaan SDM unggul yang mendukung pengembangan dan perluasan praktik ekonomi Islam di Indonesia pada khususnya, dan di ASEAN pada umumnya merupakan suatu keniscayaan. Dalam rangka itu, telah banyak institusi pendidikan yang berlomba mempersiapkan SDM sesuai dengan kebutuhan industri dan bisnis yang merupakan implementasi sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, insyaAllah masa depan ahli ekonomi Islam Indonesia ke depan semakin prospektif berkat dukungan semakin luasnya aspek praktik ekonomi Islam di negara-negara di ASEAN.

Daftar Pustaka

Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank syariah Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Bāqir , Muhammad as-Şadri, *Iqtisādunā*. Bairut: Dār Ta'āruf Lilmaṭbu'āt.

Edwin, Mustafa dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2007

Heri Sudarsono. *Asuransi syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Karim, Ir. H. Adiwarman A., S.E., M.B.A, M.A.E.P. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta. Gema Insani Press, 2001

Karim, Ir. H. Adiwarman A., S.E., M.B.A, M.A.E.P. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Khasanah, Hj. Umrotul, .*Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang. UIN-Maliki Press. 2010,

Lulail Yunus, Dr. Jamal *Manajemen Bank Syari'ah*. Malang: UIN Malang Press. 2009

Muhammad, . *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia. 2013

Nawawi, Prof. Dr. H. Ismail M.Si., M.P.A. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya: PMN. 2007

Nawawi, Prof. Dr. H. Ismail, M.Si., M.P.A. *Perbankan Syariah*. Surabaya.: VIVpress. 2010

Abdul Wadud Nafis

Nawawy, Imām, *Kitāb al- Majmu'* Bairut: Dār Maktabat al-Irsyād,
p

Nor, HM. Dumairi dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Sidogiri:
Pustaka Sidogiri. 2008

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*,
Yogyakarta: Citra Media, 2004

Saidi, Zaim *Tidak Syar'inya Bank Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta:
Delokomotif, 2010

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta:
Intermedia, 1993

Sumarni, Murti. 2002. *Manajemen Pemasaran Bank syariah Edisi Revisi*. Soemitra, Andiri, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010 Yogyakarta: liberty

Syaiful, Bakhri, Mokh. *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren*.
Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2004